

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar yang bersumber dari rakyat. Pajak yang diperoleh pemerintah digunakan untuk menjalankan program-program pembangunan yang diperuntukkan untuk rakyat. Besar kecilnya pajak yang diterima pemerintah akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan rutin. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu bangsa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut pajak merupakan penerimaan bagi pemerintah, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan.

Kontribusi perusahaan dalam bidang perpajakan memiliki andil yang cukup besar dalam perolehan pajak suatu negara apabila perusahaan memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajaknya dengan membayarnya dengan jumlah yang tepat serta tepat waktunya. Namun bagi perusahaan pajak merupakan

beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, namun pemerintah dapat memaksakan pembayaran pajak oleh wajib pajak karena pajak bersifat dapat dipaksakan.

Perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya dapat dilakukan dengan cara yang legal maupun cara yang ilegal menurut undang-undang atau sering disebut *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan pajak yang harus ditanggung dengan cara yang legal, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan *tax evasion* merupakan upaya meminimalkan beban pajak dengan cara yang ilegal.

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi diperbolehkan akan tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa risiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya yaitu denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun risiko ini dipandang tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang mempengaruhi besarnya laba perusahaan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia merupakan salah satu penyebab yang memicu terjadinya praktik penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak banyak terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Data perpajakan yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Pajak

(DJP) pada tahun 2012, terdapat 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nilai pajaknya nihil, hal ini mencerminkan praktik penghindaran pajak. Perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama tujuh tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak di bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku (Direktorat Jendral Pajak, 2013). Direktorat Jendral Pajak (DJP) menekankan pada perusahaan asing Indonesia agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran perpajakan juga terjadi di beberapa negara lainnya di luar negeri. Di Amerika terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan praktik penghindaran pajak yaitu dengan membayar pajak kurang dari 20%, padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge et al, 2008).

Dewan komisaris independen merupakan sekelompok orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebuah perusahaan harus memiliki minimal 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008).

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dari komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan juga ketaatan terhadap peraturan. Semakin

banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah dan sebaliknya semakin sedikit jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun hasil penelitiannya masih beragam. Penelitian yang dilakukan Feranika (2015) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Cahyono (2016) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, namun Fenny (2014) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak ini masih menarik untuk diteliti karena masih beragamnya hasil penelitian sebelumnya dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 dengan harapan akan mencerminkan hasil yang lebih optimal. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan variabel independen yaitu proposi dewan komisaris independen dan komite audit. Berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian ini adalah “ **Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

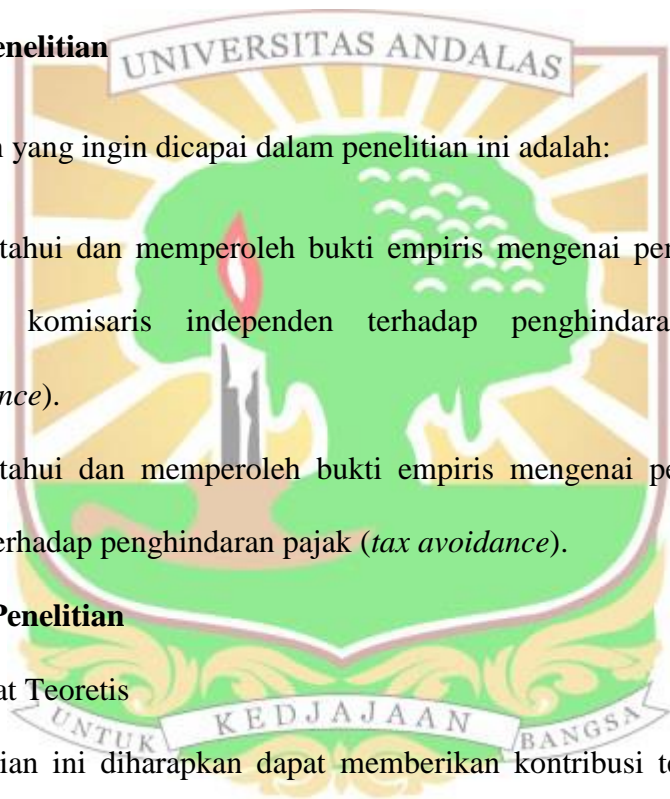
1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap praktik penghindaran pajak, sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis



Hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi penulis secara khusus untuk menambah pemahaman, pengetahuan dan memberikan keyakinan terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya faktor-faktor yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan agar perusahaan terhindar dari ketidakjelasan yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat landasan teoretis yang mendukung penelitian ini serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga berisi tentang kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metoda Penelitian

Bab ini memuat desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengukuran variabel serta teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas dan menganalisis bagaimana pengaruh proporsi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Bab V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

